

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Kebebasan Berkontrak Sebagai Asas Hukum Perjanjian

Ketua Peneliti : Naniek Endang Wrediningsih, SH

Anggota Peneliti : 1. Moch. Isnaeni, SH, MS
2. Basuki Reksowibowo, SH, MS
3. Johannes Sogar Simamora, SH
4. Agus Yudha Hernoko, SH

Fakultas/Puslit : Hukum Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1992/1993
S.K. Rektor nomor: 5186/PT03.H/N/1992 Tanggal 6 Juli 1992

Kebebasan kontrak sebagai salah satu asas dalam Hukum Perjanjian, memang memiliki kedudukan yang sentral. Bahwa dengan kebebasan kontrak ini, kerangka Hukum Perjanjian dalam kehidupan sosial akan selalu dapat mengikuti perkembangan zaman. Berbagai gejala yang muncul kemudian dikemas oleh masyarakat dalam jenis-jenis perjanjian baru, dapat memperoleh wadahnya secara layak dalam kerangka Hukum Perjanjian tanpa perlu menambah atau mengubah ketentuan yang sudah ada. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan pokok yang telah ada hanya sebagai pelengkap saja, sedang para pihak dengan amat leluasa dapat mengaturnya sendiri sesuai kesepakatan yang mereka bina.

Namun kenyataannya, kebebasan kontrak dalam kehidupan sehari-hari, terutama setelah pertumbuhan ekonomi dijadikan acuan mengembangkan masyarakat untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan, umumnya hanya menguntungkan pihak yang kuat. Ini berarti bahwa kebebasan kontrak banyak dipakai sebagai senjata bagi kalangan kuat, dengan cara sejak dini mempersiapkan persyaratan-persyaratan perjanjian, untuk kemudian disodorkan kepada pihak lawan yang relatif lebih lemah kedudukannya. Tanpa dapat mengelak, mereka yang lemah hanya dapat menyetujui karena tiadanya pilihan lain.

Bekerjanya suatu asas yang berperan sebagai pendukung suatu sistem, tentu saja harus bergandeng pula secara proporsional dengan asas lainnya yang dijadikan landasan. Begitu juga asas kebebasan kontrak, idealnya harus pula berjalan beriring dengan asas itikad baik, asas kekuatan mengikatnya perjanjian, asas persamaan,

asas kepatutan, dan sebagainya, yang kesemua itu merupakan landasan dari Hukum Perjanjian. Sebab kalau salah satu asas saja yang dominan, berarti asas lain akan tergeser, dan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum akan menjadi mentah. Demikian pula halnya dengan kebebasan berkontrak, bila terlalu dikedepankan, maka asas-asas lain dalam Hukum Perjanjian akan terdesak, dan akibatnya perlindungan yang diberikan oleh hukum tak sepenuhnya dinikmati oleh kalangan luas.

Untuk menghindari kejadian tersebut, maka penerapan asas kebebasan berkontrak harus memperoleh pembatasan-pembatasan yang layak. Banyak cara yang bisa ditempuh agar kebebasan berkontrak itu tidak disalahgunakan oleh pihak yang kuat untuk memaksa pihak yang lemah yang mestinya perlu dilindungi.

Sebagai salah satu contoh yang banyak disorot orang tentang peranan kebebasan berkontrak ini, dalam praktek banyak tertuang dalam perjanjian kredit bank. Dengan mengambil wujud sebagai perjanjian baku, kelihatan sekali kalau perjanjian kredit itu syarat-syaratnya lebih banyak ditentukan oleh pihak bank. Sedang nasabah tak banyak mengambil peran dalam akad yang mereka adakan bersama bank. Dengan kata lain nasabah ini tidak diberi kesempatan untuk ikut serta menentukan isi perjanjian yang mereka adakan. Jelas hal demikian ini tak sesuai dengan hakekat kebebasan berkontrak sebagaimana yang dikehendaki.

Praktek perjanjian kredit seperti ini, demi melindungi pihak nasabah yang memiliki posisi lebih lemah, bisa dilakukan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, dengan cara terlebih dulu memeriksa setiap perjanjian kredit baku yang akan dikeluarkan oleh semua bank. Atau pihak Bank Indonesia menentukan syarat-syarat minimum apa yang seharusnya ada dalam setiap perjanjian kredit yang dibakukan oleh semua bank, dengan berorientasi pada kepentingan nasabah.

Andai kata terjadi sengketa yang sampai di muka pengadilan tentang persoalan kebebasan berkontrak, maka hakim seyogyanya mulai memberikan peran lebih optimal pada asas itikad baik. Cara seperti ini di negeri Belanda juga sudah lama dilakukan, dengan tujuan antara lain untuk membendung disalahgunakannya asas kebebasan berkontrak yang sering kali hanya menguntungkan pihak kuat saja.

Dengan cara-cara itu kiranya asas kebebasan berkontrak akan memperoleh jalur yang lebih sesuai dengan tujuan hukum yang hendak mewujudkan keadilan bagi segenap pihak.